



SEKRETARIAT JENDERAL KEMHAN RI
BIRO INFORMASI PERTAHANAN

**FORUM
KOORDINASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025**

INTISARI KEGIATAN

Biro Informasi Pertahanan (Biro Infohan) memiliki tugas strategis dalam melaksanakan sebagian tugas perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat, pengelolaan pemberitaan, opini publik, pelayanan informasi publik, serta layanan perpustakaan. Sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Biro Infohan berfungsi mengelola infrastruktur kehumasan guna menunjang kegiatan Kemhan, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi yang akurat, cepat, dan tepat waktu kepada masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari peran pelayanan informasi publik. Hal ini menjadi semakin penting setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyediakan dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat, kecuali informasi yang termasuk kategori dikecualikan. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik.

Dalam konteks pelayanan informasi publik di lingkungan Kemhan, dibentuk organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 701/M/VI/2022. Dalam struktur organisasi PPID, Kepala Biro Humas (Infohan) berperan sebagai PPID Utama yang membawahi PPID Pelaksana di tingkat Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Pusat, dan Biro.

Sejalan dengan itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai lembaga mandiri memiliki tugas memonitor serta mengevaluasi keterbukaan informasi publik. KIP berwenang menetapkan standar layanan informasi publik melalui Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik sesuai Perki Nomor 2 Tahun 2022.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, serta menindaklanjuti berbagai surat edaran terkait penyampaian data dukung, Biro Infohan menyelenggarakan Forum Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana koordinasi pengumpulan data dukung, sinkronisasi pemahaman, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Sebagai penutup, penyelenggaraan Forum Keterbukaan Informasi Publik ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah koordinasi teknis, tetapi juga memperkuat komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Kemhan dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik yang sesuai dengan regulasi. Selain itu, forum ini diharapkan dapat memberikan hasil nyata berupa peningkatan kualitas pengelolaan informasi, optimalisasi kinerja PPID, serta pencapaian nilai yang lebih baik pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Dengan demikian, Kemhan dapat terus menjaga kepercayaan publik sekaligus memenuhi amanat Undang-Undang dalam bidang keterbukaan informasi.

DATA DUKUNG SURAT MENYURAT

DOKUMENTASI

